

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pengertian bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Awal mula kegiatan bank syariah yang pertama dilakukan oleh Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri *Islamic Rural Bank* di desa It Ghamr Bank. Bank ini beroperasi dipedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait *Finance House* yangg beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1987 berdiri Bank Syariah yang diberi nama *Faisal Islamic Bank*. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank for Investment and Development Bank.

¹ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), hlm. 17

Di Siprus tahun 1983 berdiri *Faisal Islamic Bank of Kibris*. Kemudian di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islamic Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Syariah. Kemudian di Turki negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami serta Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi pada tahun 1985. Salah satu negara yang paling populer utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan dinegaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan.

Bank syaria`h di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syaria`h pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga tahun 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka pada bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli

oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.²

2. Dasar Hukum Bank Syaria`h

a. UU Perbankan di Indonesia

Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak itu diberikan keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sungguh kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabah nya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbankan Syariah semakin luas. Kini titik kulminasi

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 166

telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

UU No. 10 tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang *dual* sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui :

- a. Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru, atau
- b. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sungguhpun demikian bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain:

- a. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
- b. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia
- c. Pengawasan internal
- d. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan faktor yang lainnya.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran.

Disamping ketentuan-ketentuan di atas bank syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.³

Pada tahun 2008 telah disahkan kembali Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Perbankan syariah adalah Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.⁴

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Salah satu sumber rujukan hukum tentang Perbankan Syariah adalah Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di Indonesia, Fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Fatwa Muhammadiyah atau Fatwa Nahdlatul Ulama, misalnya yang mempunyai lingkup yang lebih kecil. Sampai Juli 2007, DSN MUI telah mengeluarkan 61 fatwa terkait produk

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011), hlm. 76

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/1/2008, *Tentang Perbankan Syariah*, hlm. 2

keuangan syariah, seperti fatwa tentang Obligasi Syariah Ijarah, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank, Syariah *Charge Card*, dan lain sebagainya.

Walau begitu, Fatwa MUI sebagaimana fatwa organisasi masa Islam lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan merupakan hukum positif sehingga hanya mengikat masyarakat muslim secara personal saja. Selain itu, negara tidak berhak mengeluarkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar fatwa tadi. Dengan adanya UU Perbankan Syariah, maka fatwa MUI juga mempunyai pijakan. Hal ini terjadi karena UU Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai Prinsip Syariah difatwakan oleh MUI, yang kemudian diupayakan menjadi PBI setelah melalui Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti terlihat dalam Pasal 26 UU Perbankan Syariah :

- a. Kegiatan usaha Perbankan Syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah
- b. Prinsip syariah itu difatwakan oleh MUI
- c. Fatwa MUI dituangkan dalam PBI
- d. Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah

Dengan ketentuan diatas, maka kelak Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah akan lebih berdaya guna, karena akan dituangkan menjadi PBI itu sendiri. Akhirnya, fatwa MUI dapat menjadi hukum

positif yang diakui keabsahannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁵

3. Tujuan Perbankan Syariah

Melalui pembentukan dan pendirian perbankan syariah tentu banyak tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, terutama dimaksudkan untuk membangun perekonomian umat. Namun, dengan mengacu pada pengamalan Al Qur'an, tujuan utama dari pendirian bank syariah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pertama menghindari praktek riba, dan kedua mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan untuk tujuan kemashlahatan.

a. Bank Syariah Bertujuan untuk Menghindari Riba

Pembentukan perbankan syariah dimulai dengan adanya ketentuan hukum bahwa riba merupakan sesuatu yang telah diharamkan sehingga dilarang oleh agama. Dengan adanya larangan tersebut kemudian timbul pemikiran mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktik riba dalam kegiatan usaha perbankan.⁶

Karena dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT telah menghapuskan riba dan menyuburkan shadaqah, yang tertulis pada QS. Al Baqarah: 2: 276

⁵ Ibid, hlm. 80

⁶ Burhanudin Susanto, *Op Cit*, hlm. 25

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.⁷

b. Mengamalkan Prinsip Syariah dalam Perbankan

Mengamalkan prinsip-prinsip syariah ke semua aspek kehidupan merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba Nya. Tujuan secara mendasar mengamalkan prinsip-prinsip syariah ialah untuk mencapai kemashlahatan hidup dunia akhirat (*falah*). Begitu pula dalam dunia perbankan, tujuan menerapkan prinsip-prinsip syariah ialah selain untuk mengharapkan ridho Allah , juga dalam rangka mencapai kemashlahatan di bidang ekonomi.⁸

4. Konsep Dasar Bank Syari`ah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor rill melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

⁷ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 47

⁸ Burhanudin Susanto, *Op Cit*, hlm 24

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *mashlahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*. Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.

a. Konsep Operasi

Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/*trade financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.

Secara teoritis bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharabah* (*mudharabah* dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad *mudharabah* pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau *mudharib*, sedangkan dalam

pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau *shaahibul mal*.

b. Konsep Akad

Akad atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak atau, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Rukun dalam akad ada tiga, yaitu : 1) pelaku akad; 2) objek akad; 3) sighat atau pernyataan pelaku akad yaitu *ijab kabul*. Syarat dalam akad ada empat, yaitu 1) syarat berlakunya akad; 2) syarat sahnya akad; 3) syarat terealisasinya akad; 4) syarat lazim.

5. Karakteristik Bank Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari bank-bank ribawi, diantaranya sebagai berikut :

- a. Lembaga keuangan syariat harus bersih dari semua bentuk riba dan *mu`amalah* yang dilarangan syariat.

Ini menjadi *jrogan* dan syariat utamanya. Tanpa ini satu lembaga keuangan tidak boleh dinamakan lembaga keuangan syariat. DR Ghorib al Gamal menyatakan: “Karakteristik bersih dari riba dalam muamalat perbankan syariat adalah karakteristik utamanya dan menjadikan

keberadaannya seiring dengan tatanan yang benar untuk masyarakat Islami. (Lembaga keuangan syariah) harus mewarnai seluruh aktifitas yang mereka geluti tidak sekedar aktifitas bertujuan untuk merealisasikan keuntungan semata, namun perlu ditambahkan bahwa itu adalah salah satu cara berjihad dalam mengemban beban risalah dan persiapan menyelamatkan umat dari praktek-praktek yang menyelisihi norma dasar Islam. Diatas itu semua para praktisi hendaknya merasa bahwa aktifitasnya tersebut adalah ibadah dan ketakwaan yang akan mendapatkan pahala dari Allah bersama balasan materi duniawi yang didapatkan.”

- b. Mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan (*at Tanmiyah*) dengan jalan *its tishmar* (pengembangan modal) tidak dengan jalan hutang (*al Qardh*) yang memberi keuntungan. Lembaga keuangan syariah harus dapat mengelola hartanya dengan salah satu dari dua hal berikut yang telah diakui syariah:

- 1) Investasi Pengembangan modal langsung (*al Its tishmar al Mubaasyir*) dalam pengertian Bank melakukan sendiri pengelolaan harta perniagaan dalam proyek-proyek riil yang menguntungkan.
- 2) Investasi modal dengan *musyarakah* dalam pengertian Bank menanam saham dalam modal sektor riil yang menjadikan bank syariah tersebut sebagai *syariek* (sekutu) dalam kepemilikan proyek tersebut dan berperan dalam administrasi, manajemen dan pengawasan serta menjadi syariek juga dalam semua yang dihasilkan proyek tersebut baik berupa keuntungan atau kerugian

dalam prosentase yang telah disepakati diantara para *syarieek*. Karena bank syariah dibangun atas asas dan prinsip Islam, maka seluruh aktifitas mereka tunduk kepada standar halal dan haram yang telah ditentukan syariat Islam.

c. Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial.

Lembaga keuangan syariat tidak hanya sekedar mengikat pengembangan ekonomi dan pertumbuhan sosial semata, namun harus menganggap pertumbuhan sosial masyarakat sebagai asas yang tidaklah pengembangan ekonomi memberikan hasilnya tanpa memperhatikan hal ini. Dengan demikian bank syariah harus menutupi dua sisi ini dan komitmen terhadap perbaikan masyarakat dan keadilannya. Tidak seperti bank ribawi yang mengarah kepada proyek-proyek yang memiliki prospek dan menjanjikan keuntungan yang lebih banyak tanpa memperhatikan perkara pertumbuhan sosial kemasyarakatan, karena hal itu adalah kekurangan yang memiliki akibat bahaya dalam masyarakat.

d. Mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas *its titsmaar* dan pengelolaan dengan target pembiayaan proyek-proyek perdagangan, industri dan pertanian, karena kaum muslimin yang tidak ingin menyimpan hartanya di bank-bank ribawi berharap adanya bank syariat untuk menyimpan harta mereka disana.

e. Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan langsung (*Harakah at Tabaadul at Tijaari al*

Mubasyir) sedunia Islam dan bekerja sama dalam bidang tersebut agar dapat menunaikan tugasnya dengan sesempurna mungkin.

- f. Menghidupkan tatanan zakat dengan membuat lembaga zakat dalam bank sendiri yang mengumpulkan hasil zakat bank tersebut. Lalu manajemen lembaga keuangan sendiri yang mengelola zakat tersebut. Karena lembaga keuangan syariah tunduk kepada pengelolaan harta untuk muamalat Islami dan hak-hak wajib pada harta-harta tersebut.
- g. Membangun baitul mal kaum muslimin dan mendirikan lembaga untuk itu yang dikelola langsung manajemennya oleh lembaga keuangan tersebut.
- h. Menanamkan keadilan dan kesamaan dalam keberuntungan dan kerugian dan menjauhkan unsur ihtikar (penimbunan barang agar menaikkan harga) dan meratakan kemashlahatan pada sebanyak mungkin jumlah kaum muslimin setelah sebelumnya kemashlahatan tersebut hanya milik pemilik harta yang besar yang tidak peduli dari jalan mana mendapatkannya.⁹

6. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

a. Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (sebuah pengantar)*, (Jakarta: Referensi GP Press Group, 2014), cet. 1, hlm. 156-159

1) Pendanaan dengan Prinsip *Wadiah*

a) Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya.¹⁰

b) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro *wadiah* tetapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.¹¹

2) Pendanaan dengan Prinsip *Qardh*

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip *qardh*, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana dari nasabah untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu nasabah dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya.¹²

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), cet. 3, hlm. 113

¹¹ *Ibid*, hlm. 115

¹² *Ibid*, hlm. 116

3) Pendanaan dengan Prinsip *Mudharabah*

a) Tabungan Mudharabah

Bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib mal*) untuk diusahakan.

b) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umunya untuk satu bulan keatas) ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip *mudharabah at muthlaqah*. Dalam *mudharabah at muthlaqah* bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya.

c) Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al muqayyadah*. Dalam *mudharabah al muqayyadah* bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek yang dipilih.

d) *Sukuk Al Mudharabah*

Akad mudharabah juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan Sukuk yang merupakan obligasi Syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.

4) Pendanaan dengan Prinsip *Al Ijarah*

Akad *ijarah* dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan Sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.¹³

b. Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli

¹³ *Ibid*, 117-119

(*murabahah*, *salam* dan *istishna`*) dan pola sewa (*ijaraha* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*).¹⁴

1) Pembiayaan Modal Kerja

a) Bagi Hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Contoh: usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko kelontong, dan sebagainya.

Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil.

b) Jual Beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagang dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan atau margin tetap dengan meminimalkan risiko.¹⁵

2) Pembiayaan Investasi

a) Bagi Hasil

Kebutuhan investasi secara umum dapat terpenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau

¹⁴ *Ibid*, hlm. 123

¹⁵ *Ibid*, hlm. 125

musyarakah. Contoh: pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya.

Dengan cara ini pengusaha dan bank syariah berbagi risiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam kegiatan usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti *moral hazard*, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.

b) Jual beli

Kebutuhan investasi sebagainya juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Sebagai contoh, pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan risiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan.¹⁶

c) Sewa

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara berbagi hasil atau kepemilikan karena risikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi seperti itu dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah* atau *ijarah*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 126

muttahiya bittamlik. Sebagai contoh: pembiayaan pesawat terbang, kapal, dan sejenisnya.

3) Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan, dan Properti

a) Bagi Hasil

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad musyarakah mutanaqisah, misalnya, pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan nasabah. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah, bagian sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian porsi aset yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode tertentu (saat jatuh tempo), aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah.

b) Jual Beli

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah *supplier* kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan.

c) Sewa

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik*. Dengan akad ini bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir periode dengan harga yang disepakati di awal akad. Dengan cara ini bank syariah tetap menguasai kepemilikan aset selama periode akad dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Sementara itu nasabah terpenuhi kebutuhannya dengan biaya yang dapat diperkisarakan sebelumnya.

c. Produk Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru`* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi.¹⁷

Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

1) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf* .

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahan harus

¹⁷ *Ibid*, hlm. 127

dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2) *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.¹⁸

B. Prinsip Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah secara etimologi berasal dari kata *ribhun* (keuntungan). Sedangkan secara terminologi, istilah *murabahah* didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati.¹⁹

Seperti yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan, maka bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membelinya dengan harga lebih sebagai laba.²⁰

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 112

¹⁹ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan dari beberapa segi hukum)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 122

²⁰ Ahmad Irham Sholihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 140

Menurut Fuqahah Hanafi yang terkenal, Al Marginani mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan barang apapun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan.²¹ Ibnu Qudamah fuqahah Hambali, mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan pada biaya ditambah keuntungan yang telah diketahui. Pengetahuan akan biaya modal adalah persyaratan utamanya.²²

Menurut Imam Malik, *murabahah* dilakukan dan diselesaikan dengan pertukaran barang dan harga, termasuk margin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat itu dan pada tempat itu pula. Para penganut Malik secara umum tidak menyukai penjualan ini karena pemenuhannya sangat sulit. Tetapi mereka juga tidak melarangnya.²³

Dari definisi para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah suatu akad jual beli antara pihak *shahibul mal* (bank) dengan nasabah atas barang tertentu dengan nilai penjualan dan margin yang telah disepakati bersama.

Sedangkan penerapan *murabahah* dalam pembiayaan perbankan syariah didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark up* (laba). Bank-bank Islam umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang.

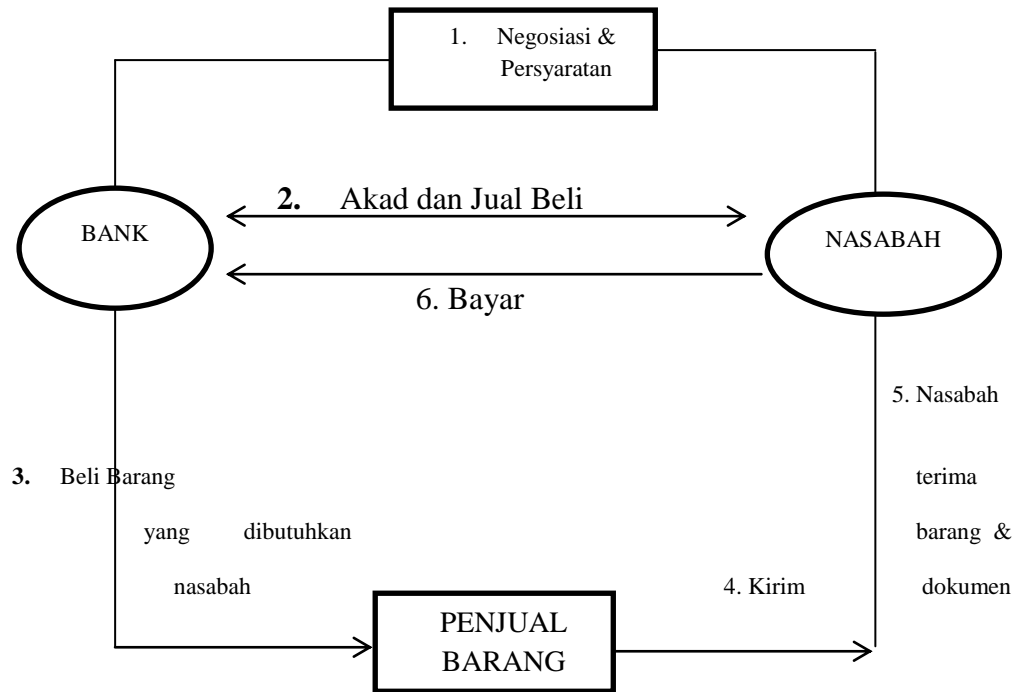
Secara umum penerapan dari pembiayaan *murabahah* dapat dilihat dari gambar skema berikut ini:

²¹ Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance*, Terj. Aditya Wisnu Abadi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 337

²² *Ibid*, hlm. 338

²³ *Ibid*

Gambar 1.
Skema Murabahah



2. Landasan Hukum dan Syarat Rukun Murabahah

a. Dasar Hukum Murabahah

Al Qur'an

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*²⁴

Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

²⁴ Departemen Agama RI, *Op Cit*

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*²⁵

Secara eksplisit, dalil-dalil diatas menjelaskan bahwa jual beli (*murabahah*) adalah halal. Dengan demikian jual beli (*murabahah*) tidak memenuhi unsur-unsur riba, gharar, dan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli tanpa paksaan sedikit pun.

1) Undang-Undang Republik Indonesia

UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat 1 d²⁶, yang berbunyi:

“Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan pembiayaan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”

2) Fatwa DSN MUI Tentang Produk *Murabahah*

Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000²⁷, yang berbunyi:

“Bahwa dalam rangka membantu guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya,

²⁵ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 83

²⁶ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 235

²⁷ Ahmad Irham Sholihin, *Op Cit*, hlm. 140

yaitu menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai laba.”

b. Syarat dan Rukun Murabahah

Menurut mayoritas jumhur ulama atau ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad *murabahah* ada empat yaitu :

- 1) Adanya penjual (*Ba`i*)
- 2) Adanya pembeli (*musytari*)
- 3) Objek atau barang yang diperjualbelikan (*mabi`*)
- 4) Harga nilai jual barang berdasarkan mata uang (*tsaman*)

Sedangkan syarat *murabaha* adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat pada barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian yang mana prinsip keterbukaan harus dijunjung tinggi²⁸

3. Konsep Pembiayaan Murabahah

a. Macam-macam Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabaha* berdasarkan prinsip jual beli terdiri dari dua jenis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Murabahah Tanpa Wakalah

²⁸ Andrian Sutedi, *Op Cit*, hlm. 122

Pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* adalah akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai perolehan ditambah margin dengan keuntungan yang diinginkan.

2) Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah

Pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* adalah bank atau lembaga keuangan syariah melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan, bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemesan, penjual, dan pembeli.

b. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Pembiayaan *murabahah* banyak sekali memberikan manfaat bagi bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabaha* juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasi di bank syariah. Selain itu, manfaat lain akad *murabaha* juga sama yaitu tidak adanya unsur riba.²⁹

²⁹ Muhammad Syafi`I Antonio, *Op Cit*, hlm. 106

c. Risiko Pembiayaan Murabahah

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- 1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya, dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain³⁰. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka yang diminta oleh bank dari nasabah saat menandatangani kesepakatan awal pesanan. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.³¹
- 4) Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah.

³⁰ *Ibid*, hlm. 107

³¹ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Murabahah*

Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.³²

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrasi serta sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

³² Muhammad Syafi'i Natonio, *Op Cit*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³³

Dalam berbagai pertauran yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

³³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan atau macet.³⁴

Dapat diartikan juga bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mana menggambarkan situasi akan terjadi resiko kegagalan dalam pengembalian kewajiban, bahkan menunjukkan gejala akan terjadi kegagalan.³⁵

Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhi salah satu dari kriteria berikut ini :

- a. Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun margin atau margin yang diinginkan.
- b. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok dan/atau margin yang menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan.
- c. Memiliki kemungkinan resiko timbul dikemudian hari.³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm.. 66

³⁵ M. Amin Aziz, et al. *SOM & SOP BMT Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)*, (Jakarta: PINBUK PRESS, 2008), hlm. 81

³⁶ *Ibid*, hlm. 83

2. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 adalah lima kategori³⁷, yaitu :

a. Lancar

Kategori lancar adalah pembiayaan yang tidak adak tunggakan margin atau angsuran pokok , dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal atau tidak diragukan lagi.

b. Kurang Lancar

Kurang lancar adalah pembiayaan yang mana pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank. Namun apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat bank, antara lain dengan mengurangi eksposur bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan yang berarti.

c. Diragukan

Diragukan berarti adalah pembiayaan yang seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya.

³⁷ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2010), hlm. 105

Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

d. Macet

Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak dapat ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.

Dari kategori-kategori pembiayaan diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR/1998, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.³⁸

3. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa :

a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar

³⁸ *Ibid.* hlm. 117

- b. Margin/bagi hasil/*fee* tidak dibayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)³⁹

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang disebabkan oleh faktor intern bank.

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)
 - 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
 - 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 - 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*)
 - 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
 - 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
 - 8) Lemahnya supervisi dan monitoring
 - 9) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses

³⁹ Faturrahman Djamil, *Op Cit*, hlm. 72

pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat

b. Faktor Ekstern (berasal dari pihak luar)

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- 2) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- 4) Usaha yang dijalankan relatif baru
- 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh
- 6) Tidak mampu menaggulangi masalah/kurang menguasai bisnis
- 7) Meninggalkan *key person*
- 8) Perselisihan sesama direksi
- 9) Terjadi bencana alam
- 10) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berrkaitan dengan industri tersebut.⁴⁰

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 73

telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi, yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasi
- d. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian

Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah, yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- 1) Pengurangan jadwal pembayaran
 - 2) Perubahan jumlah angsuran
 - 3) Perubahan jangka waktu
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan
 - 5) Perubahan prroyeksi bagi hasil dalam pembiayaan
 - 6) Pemberian potongan
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi:
- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka waktu
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Pada pembiayaan *murabahah* bank syariah dapat melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah

yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran dan konversi akad *murabahah* yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku. Pada fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah*, bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murabahah* sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan akad *murabahah* dihentikan dengan cara:

- a. Objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar
- b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualannya
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijarah* atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyarakah*
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dengan nasabah

Adapun beberapa cara lain dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau macet, antara lain yaitu:

a. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan/atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn, jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW. Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, bilamana debitur cedera janji, ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank, yaitu:

- 1) Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
- 2) Berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana pada Pasal 24 (2): objek tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya
- 3) Atas kesepakatan penjualan objek jaminan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1992 apabila debitor wanprestasi maka objek jaminan dapat dieksekusi dengan cara:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelanggan umum
- 3) Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan

Pada Undang-Undang Perbankan Syariah Pasa 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun diluar pelelangan, penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam hal harga pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terikat langsung dengan proses pembelian agunan.⁴¹

b. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa atau pemutusan sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang arbiter berdasarkan persetujuan para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih atau tunjuk

⁴¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 108-118

tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa: “Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.⁴²

Dasar hukum keberadaan arbitrase dalam Islam dengan bersandar pada Al Qur`an sebagai sumber pertama dari hukum Islam, maka dapat dijumpai terhadap upaya perdamaian untuk penyelesaian sengketa para pihak dibidang bisnis, keluarga atau peperangan itu terdapat didalam Al Qur`an sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

*Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An Nisa`: 35).*⁴³

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bila mana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

⁴² Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publisng, 2012), hlm. 197

⁴³ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 84

Dalam hal ini BASYARNAS berwenang antara lain yaitu :

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan dengan :

- 1) Mencantumkan klausul arbitrase dalam suatu naskah perjanjian
- 2) Perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbulnya sengketa

Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS jarang dilakukan oleh bank syariah sehingga BASYARNAS tampak kurang berperan didalam menyelesaikan sengketa.

c. Penyelesaian Lewat Litigasi

Akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beriktikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah, dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Tujuan dari keberadaan peradilan agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Perubahan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 adalah perluasan kekuasaan atau wewenang pengadilan agama yang meliputi juga sengketa di bidang ekonomi syariah, hal ini terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Yang dimaksud dalam ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut syariah.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sengketa ekonomi syariah tidak dapat diselesaikan di pengadilan agama, karena wewenang pengadilan agama dibatasi oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang hanya dapat memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut perkawinan,

warisan, hibah, wasiat, sedekah, dan waqaf. Oleh karena itu, apabila ada sengketa ekonomi syariah, para pihak dapat menyelesaikannya dipengadilan negeri (jalur litigasi) atau Badan Arbitrase Syariah (jalur non litigasi). Kewenangan pengadilan agama yang dipaparkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi syariah.

Pada Pasal 49, disebutkan bahwa “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

d. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus buku tidak berarti kewajiban tunggakan nasabah kepada bank syariah telah dinyatakan lunas atau tidak ada lagi hak tagih bank syariah kepada nasabah ataupun hubungan hukum. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka

restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.⁴⁴

Kriteria pembiayaan yang dapat diusulkan untuk dihapus buku adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang sudah berkolektibilitas macet
- b. PPAP telah dibentuk 100% tanpa memperhitungkan nilai agunan, dilampiri proofsheets PPAP posisi terakhir.
- c. Terpenuhinya kelengkapan administrasi, seperti surat peringatan I, II, dan III yang diterima oleh nasabah secara patut, baik dikirim langsung maupun melalui jasa pengiriman, bukti pengiriman dan tanda terima surat yang ditandatangani oleh nasabah atau yang menerimanya agar disimpan dengan baik, mengingat dokumen dapat menjadi bukti saat litigasi, adanya surat pernyataan atau kesepakatan dari nasabah mengenai pembayaran yang tidak ditepati, serta adanya bukti tidak terbayarnya *cessie* yang merupakan agunan dari pembiayaan tersebut minimal berupa surat penagihan dari bank.
- d. Apabila nasabah memiliki lebih dari satu pembiayaan, maka hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap salah satu atau sebagian pembiayaan.

⁴⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Op Cit*

Sebelum bank akan melakukan hapus buku atas pembiayaan nasabah maka harus dipersiapkan data yang dibutuhkan, antara lain meliputi:

- a. Data nasabah
- b. Data fasilitas pembiayaan
- c. Data agunan
- d. Data yang berisi fakta atau informasi latar belakang penyebab pembiayaan menjadi bermasalah dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bank dan hasil dari upaya tersebut.
- e. Data yang berisi tentang rencana penyelesaian dengan pertimbangan-pertimbangan yang akan mempercepat dan memperkuat rencana tersebut.⁴⁵

D. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fiqh, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang-piutang (*dain*).

1. Landasan Utang-Piutang

Ajaran Islam bersandar kepada Al Qur`an dan Hadits Nabi saw mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha (*muamalah*) atau

⁴⁵ Gunawan Wijaya dan Kartini Mulyadi, *Hapusnya Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), hlm. 173

karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya⁴⁶. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Baqarah : 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْشُورَةً ۚ فَإِنْ أَفْنَىٰ مِنْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَالَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتُهُ وَلَيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁴⁷

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan).

2. Etika Utang-Piutang

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang antara lain sebagai berikut:

a. Menepati Janji

Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang

⁴⁶ Faturrahman Djamil, *Op Cit*, hlm. 74

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, hlm. 39

berutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggung jawab terhadap janji-janjinya.⁴⁸ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Maidah:

1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”⁴⁹

b. Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap *zalim*, bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (*munafiq*). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah saw:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

Artinya: “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).

لَيْسَ الْوَاجِدُ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

Artinya: “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

⁴⁸ Faturrahman Djamil, *Op Cit* 75

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, hlm. 106

c. Lapang Dada Ketika Membayar Utang

Salah satu akhlak yang mulia adalah berlaku *tasamuh* (toleransi) atau lapang dada dalam membayarn utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit, dan menahan hak orang. Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

Artinya: “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari).

d. Tolong-menolong dan Memberi Kemudahan

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).⁵⁰

⁵⁰ Ibid, hlm. 77

